



ISSN: 1858-2664

Maret 2007, Vol. 3, No.1

KAJIAN ANALITIK

LEARNING SOCIETY, PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Pudji Muljono

Pendahuluan

Keprihatinan bangsa yang tengah dilanda krisis dalam berbagai aspek kehidupan membuat peran pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah dipertanyakan. Begitu pula peran kegiatan penyuluhan dalam proses pembangunan bangsa masih sering dipertanyakan. Dengan melihat kondisi realitas yang ada, seperti maraknya tawuran pelajar, merebaknya kasus narkoba, dan beberapa perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan budaya, seperti pergaulan bebas, membuat peran pendidikan dan penyuluhan semakin dipertanyakan. Seolah pendidikan di sekolahlah yang bertanggungjawab terhadap berbagai permasalahan yang menyelimuti generasi penerus bangsa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pendidikan dan penyuluhan sering pula dijadikan sebagai kambing hitam terhadap ketidakberhasilan dalam membentuk moral bangsa.

Oleh karena itu menjadi wajar apabila permasalahan yang berat tersebut harus ditanggung oleh pendidikan dan penyuluhan. Khususnya terhadap pendidikan formal di sekolah, sebab persepsi masyarakat terhadap sekolah mewakili kondisi yang ada dalam masyarakat/negara. Kenyataan ini menurut Azra (1999), sebenarnya telah pula mendapatkan perhatian para filosof sejak jaman Plato dan Aristoteles dengan ungkapannya: “sebagaimana negara, seperti itulah sekolah” (*as is the state, so is the school*), atau “apa yang anda inginkan dalam

negara, harus anda masukkan dalam sekolah” (*what you want in the state, you must put into school*). Jika hal ini dijadikan sebagai pijakan dalam melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, maka apabila kondisi masyarakat yang ada dinyatakan tidak berhasil dalam mengantarkan masyarakat Indonesia mencapai tujuan yang dicanangkan, maka itu diakibatkan oleh pendidikan yang jelek.

Sebaliknya, apabila kondisi masyarakat yang ada dinilai baik, maka pendidikan dapat dinyatakan berhasil menghampiri tujuan yang telah ditetapkan. Namun, apakah dengan mudah bisa dinilai demikian? Sebab dalam prakteknya banyak aspek dan pihak yang terlibat dalam mengantarkan bangsa Indonesia untuk sampai pada tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wacana ini memberikan makna, bahwa di antara institusi yang mengambil peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tidak hanya didominasi oleh sistem sekolah, tetapi juga peran keluarga dan masyarakat yang mengelilinginya antara lain melalui kegiatan penyuluhan.

Mengacu dari hal tersebut, maka perlu diperhatikan lingkungan di luar sekolah, baik secara formal maupun non formal, bahkan informal sekaligus. Pada gilirannya harus diciptakan lingkungan yang kondusif, yang mampu mengembangkan potensi masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan dan penyuluhan yang disepakti bersama.

Permasalahan-permasalahan inilah yang akan dicoba dibahas dalam tulisan berikut ini.

Learning Society dan PEMBERDAYAAN Masyarakat

Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani (*civil society*), pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar (*learning society*) atau biasa juga disebut dengan *educational society*. *Learning society* secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia meski belum secara maksimal- namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila *civil society* telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk *learning society* belum ditemukan konsep yang matang dan *fixed*, sehingga istilah *learning society* belum populer didengungkan apalagi dimasyarakatkan (Al-Rasyidin dan Nizar, 2005).

Pembahasan tentang *learning society* pada tahun 1971 telah diperkenalkan oleh Husen. Menurut pendapatnya, *learning society* adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam bidang pendidikan (Husen, 1995). Selama ini peran lembaga pendidikan formal, dalam arti sekolah, yang baru mendapatkan perhatian. Sementara pendidikan non formal dan informal di Indonesia belum mendapatkan perhatian, mulai mendapatkan perhatian hanya dalam porsi yang sedikit. Berkaitan dengan masalah ini, dia menekankan adanya suatu kenyataan bahwa sekolah adalah dan haruslah merupakan bagian integral dari masyarakat di sekitarnya, dan sama sekali tidak boleh bergerak di dalam kehampaan kehidupan sosial.

Pemahaman terhadap dunia pendidikan yang terfokus pada pendidikan formal saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan (mendidik) dapat diartikan secara luas. Hal ini dipahami untuk menyebut semua upaya untuk mengembangkan tiga hal, yaitu pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau

sekelompok orang. Dengan kata lain, untuk menyebutkan peristiwa yang dampaknya ialah berkembangnya pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup diri seseorang atau sekelompok orang. Kalau suatu pendidikan sejak awal dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, maka hal ini disebut sebagai pendidikan formal dan pendidikan non formal. Sebaliknya, apabila suatu tindakan yang sebenarnya tidak dirancang untuk mengembangkan ketiga hal tersebut, melainkan berdampak demikian, maka peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai pendidikan informal. Dengan demikian, pendidikan formal dan non formal selalu berupa upaya atau ikhtiar, sedangkan pendidikan informal selalu berupa peristiwa.

Jika dicermati lebih jauh, pemahaman terhadap ketiga jenis pendidikan tersebut diketengahkan untuk memberikan pengertian baru terhadap peran pendidikan formal dan non formal. Dalam pengertian baru ini, maka kegiatan pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pada gilirannya nanti tidak hanya pendidikan formal dalam arti sempit, sekolah yang mendapatkan perhatian, akan tetapi juga pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan masyarakat (luar sekolah).

Pemahaman yang sekarang berkembang adalah menekankan pendidikan formal pada lingkungan sekolah, sehingga sekolah mendapat perhatian yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, apabila terjadi suatu ketidakselarasan atau penyimpangan pendidikan yang berlangsung dengan tujuan yang ditetapkan, maka sekolah akan mendapatkan sorotan yang paling tajam. Sementara pendidikan di luar sekolah dan pendidikan keluarga kurang mendapatkan perhatian, atau bahkan cenderung terabaikan. Inilah yang kemudian membuat situasi pendidikan terlihat pincang, sebab pertumbuhan setiap manusia atau setiap masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengalaman pendidikan formal. Pengaruh-pengaruh yang datang dari pengalaman-

pengalaman pendidikan non formal dan informal sungguh tidak kalah penting. Dari sini dapat dilihat arti penting pendidikan dalam lingkungan di luar sekolah (baca: masyarakat) dan pendidikan di lingkungan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kondisi yang mendukung terciptanya suatu masyarakat dan keluarga yang terus-menerus berada di dalam nuansa proses belajar (non formal dan informal).

Beberapa harapan yang ingin dicapai melalui *learning society*, khususnya jika dikaitkan dengan perwujudan masyarakat madani, menurut Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999) adalah sebagai berikut:

- (1) Terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Terciptanya masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat;
- (3) Masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia;
- (4) Masyarakat yang tertib dan sadar hukum, budaya malu apabila melanggar hukum yang melekat dalam semua lapisan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan;
- (5) Masyarakat yang percaya pada diri sendiri, memiliki kemandirian dan kreatif terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, masyarakat memiliki orientasi yang kuat pada penguasaan ilmu dan teknologi;
- (6) Sebagai bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan yang universal;
- (7) Terwujudnya tatanan masyarakat yang beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan martabat manusia;
- (8) Mewujudkan masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Usaha yang dapat dilakukan guna mewujudkan masyarakat belajar adalah dengan memberdayakan keluarga agar menjadi keluarga yang gemar belajar. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat menentukan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pengaruh keluarga dalam hal ini adalah mengarahkan proses tumbuh kembang generasi muda dalam masyarakat. Apakah dalam keluarga tersebut mampu membentuk anak-anak menjadi anak yang gandrung belajar? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya merangsang rasa ingin tahu anak, berkeinginan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Keberanian untuk mencoba dan mengulangi segala sesuatu sampai berhasil, kreatif, berpikir kritis, inovatif dan karakter lainnya yang lebih baik yang diperlukan demi masa depan yang lebih baik.

Anak lahir dalam keadaan fitrah, artinya anak berpotensi tauhid dan berpotensi untuk berbuat baik. Tidak ada anak yang memiliki bakat jelek, apabila diberi kesempatan dan diberi peluang untuk mengembangkan potensinya dengan baik, maka ia akan menjadi baik. Kenakalan anak misalnya, secara psikologis membutuhkan kreatifitas dan keberanian, yang keduanya bukan potensi bawaan sejak lahir, akan tetapi merupakan perolehan dari hasil belajar dan interaksi dengan lingkungan. Oleh sebab itu, kenakalan anak munculnya sebagian besar berasal dari keluarga dan masyarakat. Sumber dari keluarga antara lain: rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang acuh terhadap perkembangan anak, memanjakan anak secara berlebihan, mendidik anak secara keras dan otoriter, kebiasaan hidup yang tidak baik, ketidakmampuan orang tua untuk mengendalikan anak dari pengaruh luar yang merusak (Thoha, 1996). Dalam kaitan ini, Ruben (1988) mencontohkan jika anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh

kekerasan maka ia akan tumbuh dan belajar untuk berkelahi.

Sementara itu, menurut Akhir (1997) dalam memberdayakan pendidikan keluarga, relevan untuk ditampilkan beberapa fungsi keluarga, yaitu: (a) fungsi keagamaan, (b) fungsi cinta kasih, (c) fungsi reproduksi, (d) fungsi ekonomi, (e) fungsi pembudayaan, (f) fungsi perlindungan, (g) fungsi pendidikan dan sosial, (h) fungsi pelestarian lingkungan.

Di samping memberdayakan pendidikan keluarga, upaya mewujudkan *learning society* adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan proses belajar informal dan non formal. Permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya peran masyarakat, antara lain dapat dilihat dari lemahnya kontrol sosial dan kontrol moral dalam masyarakat terhadap penyimpangan-penyimpangan perilaku, pergeseran tata nilai baik dan buruk dalam masyarakat, serta menurunnya tanggung jawab sosial. Ikut melengkapi menurunnya peran masyarakat ini adalah kemajuan media informasi dan komunikasi yang mampu membuka dinding-dinding kamar setiap rumah sampai ke pedesaan yang tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental anggota masyarakat.

Pertanyaan yang perlu dijawab dalam masalah ini adalah bagaimana menciptakan suatu masyarakat yang gemar belajar banyak hal yang positif dan suka bekerja keras sekaligus bermoral. Di negara-negara Eropa, dalam usahanya mewujudkan *learning society* dengan melalui lima periode (Al-Rasyidin dan Nizar, 2005), diawali dengan diberlakukannya pendidikan formal tingkat dasar pada tahun 1815-1880. Pada awal abad 20 dilaksanakannya pendidikan umum, yang diikuti oleh setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, atau golongan. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat diistilahkan dengan wajib belajar. Pertengahan abad 20, yakni tahun 1950-1960, terjadi ledakan peserta didik di segala jenjang pendidikan. Pada tahap selanjutnya, lahir konsep pendidikan orang dewasa (*adult/permanent/recurrent education*) atau dapat disebut sebagai *long life*

education. Periode ini diakhiri dengan masuknya teknologi di dunia pendidikan. Seperti dinyatakan oleh Adler dalam Salkind (1985) bahwa tujuan dari proses belajar adalah pertumbuhan; tidak seperti tubuh kita yang semakin uzur, sementara pikiran kita dapat tumbuh terus selama hayat dikandung badan (*The purpose of learning is growth, unlike our bodies, our minds can continue growing as we continue to live*).

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa *learning society* berkembang dengan cara bertahap. Pertama yang harus dilakukan adalah memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan proses belajar melalui pendidikan. Selama ini, pendidikan memang telah menunjukkan perannya, akan tetapi tidak jarang peran tersebut tidak selaras dengan gerak pembangunan di sektor lainnya, sehingga terlihat pincang. Oleh karena itu, bergulirnya gagasan otonomi daerah, yang diikuti oleh otonomi pendidikan perlu disambut gembira, dengan harapan peran masyarakat dalam pendidikan dan proses belajar dapat berlangsung secara maksimal dan optimal. Pada sisi lain, dengan adanya otonomi pendidikan diharapkan akan meningkatkan tanggungjawab masyarakat terhadap keberlangsungan kehidupan, khususnya dalam mempersiapkan generasi mudanya, guna menyongsong masa depan yang lebih baik dengan penuh optimisme.

Gagasan tentang *learning society* semestinya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap makna pendidikan, sehingga perwujudan masyarakat belajar akan lebih mudah tercapai. Usaha dalam mewujudkan masyarakat belajar ini tidak terlepas dari *political will* pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Penyuluhan dan Pembangunan Bangsa

Pada hakekatnya, pembangunan nasional bertujuan untuk selalu terus menerus memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan manusia, orang per orang maupun bagi seluruh warga masyarakatnya. Menurut Slamet (2001), tercapainya tujuan pembangunan nasional harus didukung oleh kesiapan mental dan intelektual serta kiprah seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara berkualitas dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Kualitas partisipasi masyarakat, di antaranya diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan pembangunan.

Penyuluhan pembangunan merupakan pengetahuan tentang bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penyuluhan pembangunan merupakan suatu bentuk pengetahuan tentang perilaku manusia.

Istilah penyuluhan digunakan dalam bahasa yang berbeda di beberapa negara. Van den Ban dan Hawkins (1999) menyatakan bahwa dalam bahasa Belanda digunakan istilah *Voorlichting* yang berarti penerangan. Malaysia yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris menggunakan kata *Perkembangan*. Bahasa Inggris dan Jerman masing-masing menggunakan istilah pemberian saran atau *Baratung* yang berarti memberikan petunjuk tetapi pilihan tetap ditentukan oleh yang bersangkutan. Jerman menggunakan istilah *Aufklarung* yang berarti pencerahan. Dalam bahasa Austria digunakan istilah *Forderung* yang berarti menggiring seseorang ke arah yang diinginkan sedangkan bahasa Perancis menggunakan istilah *Vulgarization* yang menekankan pentingnya penyederhanaan pesan bagi orang awam. Spanyol menggunakan istilah *Capacitacion* yang dapat diartikan sebagai pelatihan. Sementara itu,

Slamet (2001) menyatakan istilah penyuluhan pada awal kegiatannya disebut dan dikenal sebagai *Agricultural Extension*. Dengan pengembangan penggunaannya di bidang-bidang lain, maka sebutannya berubah menjadi *Extension Education* dan *Development Communication*. Meskipun antara ketiga istilah tersebut terdapat perbedaan, namun pada dasarnya mengacu pada disiplin ilmu yang sama.

Dalam bahasa Indonesia, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar "suluh" yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang "belum diketahui (dengan jelas)". Namun, penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar "memberi penerangan", tetapi penerangan yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat (Mardikanto, 1993).

Sebagai suatu kegiatan, penyuluhan pembangunan sudah lama dilaksanakan dan dirasakan kebutuhannya untuk menunjang pembangunan di banyak negara. Dalam kaitan ini, Mardikanto (1993) menyebutkan kehadiran penyuluhan pertanian di Indonesia sebagai bidang kegiatan, sebenarnya sudah berlangsung hampir dua abad yang lalu, yakni sejak didirikannya Kebun Raya Bogor oleh Reinwardt pada tahun 1817. Menurut catatan sejarah, di Skotlandia, pengembangan ilmu penyuluhan pertanian sudah dirintis sejak tahun 1723. Akan tetapi kehadirannya sebagai cabang keilmuan sebenarnya belum lama. Sejak saat itu, konsep tentang penyuluhan dan penyuluhan pertanian terus mengalami perkembangan.

Sejak pemerintahan Orde Baru, kegiatan penyuluhan yang semula hanya dikenal di kalangan orang-orang pertanian, semakin dikembangkan untuk beragam sektor kegiatan pembangunan, sehingga kemudian muncullah penyuluhan agama, penyuluhan koperasi, penyuluhan transmigrasi,

penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan industri kecil, penyuluhan hukum, penyuluhan perpajakan, dan lain-lain. Menurut Slamet (2001), keragaman sektor penyuluhan tersebut mendasari munculnya penyuluhan pembangunan yang merupakan pengembangan dari penyuluhan pertanian.

Sapoetro (*dalam* Mardikanto, 1993) menjelaskan kunci pentingnya penyuluhan di dalam proses pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa pelaku utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk golongan ekonomi lemah, baik lemah dalam permodalan, pengetahuan, dan keterampilannya, maupun lemah dalam hal peralatan dan teknologi yang diterapkan. Di samping itu, mereka juga seringkali lemah dalam hal semangatnya untuk maju dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam kaitan ini, pembangunan bangsa dapat mendorong masyarakat untuk belajar memperbaiki dan meningkatkan karakter bangsa yang baik sesuai cita-cita luhur pendiri bangsa ini.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa, praktek penyuluhan yang bertujuan untuk menawarkan atau "memasarkan" inovasi sampai dengan inovasi tersebut diadopsi oleh masyarakat, bukanlah pekerjaan yang gampang. Di dalam praktek, kegiatan penyuluhan selalu menuntut kerja keras, kesabaran, memakan banyak waktu, dan sangat melelahkan. Sehingga pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan kian menjadi kebutuhan banyak pihak.

Pentingnya penyuluhan pembangunan juga diawali oleh kesadaran akan adanya kebutuhan manusia untuk mengembangkan dirinya agar lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, menurut Mardikanto (1993) kegiatan penyuluhan pembangunan terus menerus dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar mereka memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan.

Pada masa lalu, penyuluhan dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Kini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi masing-masing pilihan itu. Dengan demikian, tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku petani (Van den Ban dan Hawkins, 1999).

Menurut Slamet *dalam* Mardikanto (1993), tujuan yang sebenarnya dari penyuluhan adalah terjadinya perubahan perilaku sasarannya. Hal ini merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung dengan indera manusia. Dengan demikian, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, mampu melaksanakan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan pertanian. Dengan kata lain, Slamet (2001) mendefinisikan penyuluhan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang berakibat pada kualitas kehidupan yang lebih baik.

Hal yang sama juga didefinisikan oleh Wiriaatmadja (1973) yang menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sistim pendidikan di luar sekolah, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan mampu/bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan dan memuaskan. Jadi penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal.

Melalui penyuluhan juga harus diupayakan tidak terciptanya "ketergantungan" masyarakat kepada penyuluhnya. Penyuluh hanya sekadar sebagai fasilitator dan dinamisator untuk memperlancar proses pembangunan yang direncanakan. Dengan kata lain, melalui penyuluhan, ingin dicapai suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai ilmu dan teknologi, memiliki sikap yang progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap sesuatu (informasi) yang baru, serta terampil dan mampu berswadaya untuk mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakatnya.

Pernyataan tentang tujuan penyuluhan tersebut sesuai dengan falsafah penyuluhan yang dianut yaitu harus berpijak pada pentingnya pengembangan individu (Kelsey dan Herane *dalam* Mardikanto, 1993). Masyarakat harus dilihat sebagai manusia biasa yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya dan memiliki keinginan dan harapan untuk terlepas dari keadaan yang tidak mereka kehendaki. Karena itu, pelaksanaan penyuluhan harus mampu tidak saja mengembangkan potensi masyarakat tetapi juga harus mau memberikan peluang kepada kekuatannya sendiri untuk mengembangkan potensinya supaya terlepas dari kemiskinan dan kebodohan.

Dalam kaitan itu, Kelsey dan Hearne (Mardikanto, 1993) mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pendapat tersebut, terkandung pengertian bahwa :

- (1) Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya berkerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.

- (2) Penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasaran.

- (3) Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Mengacu pada paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) manusia ke arah yang lebih baik sehingga mereka menjadi berdaya dan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Jadi, disinilah nilai penting penyuluhan sebagai suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini sesuai dengan hakekat ilmu yang berfungsi sebagai pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.

Penutup

Konsep *learning society* dan penyuluhan merupakan dua hal yang sejalan dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa. Melalui program *learning society* diupayakan terciptanya pengelolaan dalam kegiatan-kegiatan proses belajar yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan pendekatan demikian, diharapkan akan mempertebal rasa *self of belonging* terhadap keadaan atau kondisi yang ada dalam masyarakat dan negara, yang pada gilirannya nanti akan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang

mengelilinginya. Pada akhirnya, dengan *learning society* diharapkan akan terwujud masyarakat madani (*civil society*), sebagaimana akhir-akhir ini marak diwacanakan di bumi Indonesia, sekaligus sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah atau krisis yang melanda negeri ini.

Sementara itu, dalam konteks penyuluhan pembangunan, keberadaannya sebagai suatu ilmu didasari kenyataan bahwa pelaksana utama pembangunan adalah masyarakat kecil yang umumnya termasuk golongan lemah, baik secara ekonomi, pengetahuan, keterampilan, maupun semangatnya untuk maju dalam memperbaiki hidupnya. Karena itu, ilmu penyuluhan pembangunan perlu terus menerus dikembangkan dalam rangka menggerakkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar mereka berdaya dan memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam melaksanakan kegiatannya, penyuluhan menerapkan suatu cara atau metode tertentu yang terdiri dari beberapa langkah sistematis yaitu pengenalan keadaan atau situasi masyarakat setempat, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi). Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Motto yang dapat digunakan antara lain membelajarkan sesuatu kepada masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu membuat pancing dan menggunakannya di tempat-tempat yang ada ikannya.

Rujukan

Akhir, Yaumil C.A. 1997. "Reformasi Pendidikan sebagai Upaya Memaksimalkan Hasil Pendidikan", dalam Dawam Raharjo (ed.), *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*. Jakarta: Intermedia.

- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam: pendekatan historis, teoritis dan praktis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Azra, Azyumardi. 1991. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Husen, Torsten. 1995. *Masyarakat Belajar*, terjemahan Surono Hargsewoyo. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret: University Press.
- Ruben, B.D. 1988. *Communication and Human Behavior*. 2nd Edition. New York: Macmillan Publ.Co.
- Slamet, Margono. 2001. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas", dalam *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia: Menyongsong Abad 21*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Salkind, N. 1985. *Theories of Human Development*. New York: John Wiley and Sons.
- Thoah, M. Chabib. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- van den Ban, AW dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Wiriaatmadja, S. 1973. *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Penerbit PT Yasaguna.